

**PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, KEMISKINAN,
DAN PENDIDIKAN TERHADAP KRIMINALITAS
DI INDONESIA**

Skripsi

Oleh

**SEPTIANA TRI SUSANTI
2111021095**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, KEMISKINAN,
DAN PENDIDIKAN TERHADAP KRIMINALITAS
DI INDONESIA**

**Oleh
SEPTIANA TRI SUSANTI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, KEMISKINAN, DAN PENDIDIKAN TERHADAP KRIMINALITAS DI INDONESIA

Oleh

SEPTIANA TRI SUSANTI

Kriminalitas merupakan isu sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pendidikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Data yang digunakan bersifat panel dengan cakupan 32 provinsi selama periode 2014–2023. Metode analisis yang digunakan adalah *two-step System Generalized Method of Moments* (SYS-GMM) untuk mengatasi dinamika data dan potensi endogenitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas, sedangkan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci : Kriminalitas, Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan, Pendidikan

ABSTRACT

THE EFFECT OF INCOME INEQUALITY, POVERTY, AND EDUCATION ON CRIME IN INDONESIA

By

SEPTIANA TRI SUSANTI

Crime is a social issue influenced by various economic factors. This study aims to analyze the influence of income inequality, poverty, and education on crime in Indonesia. The data used is panel data covering 32 provinces during the period 2014–2023. The analysis method used is the two-step System Generalized Method of Moments (SYS-GMM) to address data dynamics and potential endogeneity. The results show that poverty and education have a positive and significant effect on crime, while income inequality does not have a significant effect.

Keywords : *Crime, Income Inequality, Poverty, Education*

Judul Skripsi

: Pengaruh Ketimpangan Pendapatan,
Kemiskinan, Dan Pendidikan Terhadap
Kriminalitas Di Indonesia

Nama Mahasiswa

: Septiana Tri Susanti

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2111021095

Jurusan

: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si.
NIP 19590719 198703 1 002

Prayudha Ananta, S.E., M.Si.
NIP 19880916 201404 1 001

MENGETAHUI

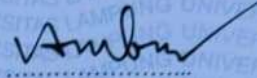
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.M.
NIP 19800705 200604 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si.



Penguji I : Dr. Asih Murwati, S.E., M.E.



Penguji II : Prayudha Ananta, S.E., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Agustus 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septiana Tri Susanti

NPM : 2111021095

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan, Dan Pendidikan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, ditulis dengan penuh kesungguhan, serta tidak menjiplak karya pihak lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2025

Penulis



Septiana Tri Susanti

RIWAYAT HIDUP



Septiana Tri Susanti lahir di Negara Tulang Bawang pada tanggal 21 September 2003. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Suwandi dan Ibu Purjinah.

Penulis mulai menempuh pendidikan di TK Riyadlus-Sholihin di desa Negara Tulang Bawang pada tahun 2009-2010. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Negara Tulang Bawang pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMP PG Bunga Mayang dan lulus pada tahun 2018. Penulis lulus dari SMAN 2 Kotabumi pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis melanjutkan studi ke Universitas Lampung jurusan Ekonomi pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) dan *Economic & Business Entrepreneur Club* (EBEC). Selanjutnya, pada tahun 2024, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Muara Tenang Timur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Kemudian penulis mengikuti program magang mandiri di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al- Insyirah [94]: 5- 6)

“*Nggak perlu perfect yang penting beres*”

(Eva Alicia)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang selalu mengiringi setiap langkah dalam perjalanan hidup ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang agung dan pembawa cahaya bagi umat manusia.

Dengan penuh rasa hormat, kerendahan hati, serta penghargaan atas kesabaran yang luar biasa, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk semangat, usaha, cinta, dan kasih sayang penulis kepada orang-orang yang sangat berharga dalam perjalanan hidup ini.

Teruntuk ayah dan ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa yang senantiasa mengiringi langkahku, serta dorongan yang tak pernah surut dalam setiap proses perjuanganku. Disaat tubuhku lelah dan semangatku meredup, bayang wajah kalian selalu menjadi penguat, dan dalam setiap kegelisahan, aku menemukan ketenangan dalam doa-doa kalian yang tak pernah henti. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa ketulusan pengorbanan dan kerja keras kalian.

Untuk teman-teman serta seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan motivasi, bimbingan, pelajaran, pengalaman, dan nasihat.

**Alamater Tercinta, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Lampung**

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan, Dan Pendidikan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga membantuk proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan. Terima kasih atas dukungan selama masa perkuliahan serta kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing pertama. Penulis menyampaikan terima kasih atas ilmu, bimbingan, nasihat, arahan, serta berbagai saran dan masukan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi berlangsung.

5. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing kedua. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, serta arahan yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan dari Bapak, penyelesaian skripsi ini mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Penulis juga sangat menghargai keterbukaan Bapak dalam memberikan ruang konsultasi serta kesediaan Bapak untuk memahami setiap kendala yang penulis hadapi sepanjang proses ini.
6. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembahas. Terimakasih atas masukan dan saran serta dukungan yang sangat bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E., selaku Dosen Pembahas. Terimakasih atas kritik dan saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penelitian ini.
8. Bapak Imam Awaluddin S.E., M.E., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas bantuan dan bimbingan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengetahuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terimakasih atas pelayanan dan bantuan yang diberikan selama perkuliahan.
11. Kedua orang tuaku, Bapak Suwandi dan Ibu Purjinah, terima kasih atas cinta yang tulus tanpa batas, atas doa-doa yang senantiasa menyertaiku, serta atas segala pengorbanan yang kalian berikan tanpa mengharap imbalan. Apa yang berhasil penulis capai hari ini bukan semata hasil usaha sendiri, melainkan juga wujud dari ketulusan, kesabaran, dan cinta kalian yang begitu besar dan tak ternilai harganya.
12. Kepada kakak, keponakan, serta keluarga besar Mbah Kairan, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian yang diberikan telah menjadi sumber motivasi serta penopang yang berarti dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang perjalanan akademik ini.

13. Teruntuk sahabat SMA ku Uyun Pratiwi, atas persahabatan yang penuh arti, dukungan yang tak pernah surut, serta semangat yang selalu dibagikan di setiap fase kehidupan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa selama ini.
14. Kepada Kaktu Wina, terima kasih telah menjadi sosok kakak di tanah rantau, yang tak hanya menemani dalam suka dan duka, tetapi juga selalu ada sebagai teman curhat, teman satu kontrakan, sekaligus teman berbagi canda, tawa, dan cerita-cerita keseharian. Kehadiranmu sangat berarti dalam perjalanan ini, menjadi penyemangat di tengah lelah, menjadi pendengar saat hati ingin bicara, dan menjadi bagian dari kenangan indah yang akan selalu penulis kenang.
15. Untuk Teman-teman Gerabah, Wina, Puput, dan Dea, terima kasih atas kebersamaan yang penuh warna selama masa perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita, lelah, tawa, dan semangat. Persahabatan kalian menjadi bagian penting dari perjalanan ini, baik dalam proses akademik maupun kehidupan sehari-hari. Semoga kebersamaan dan kenangan yang telah terukir tetap hangat di hati, meskipun langkah kita nantinya akan berjalan ke arah yang berbeda.
16. Kepada Lili, terima kasih yang tulus penulis sampaikan atas kebersamaan dan ketulusanmu dalam menemani hari-hari yang sepi saat teman-teman lainnya pulang kampung. Kehadiranmu menjadi pelipur rasa sendiri, teman berbagi cerita, dan penguat di tengah kesunyian. Terima kasih telah menjadi sosok yang menyenangkan, sabar, dan selalu hadir tanpa diminta. Kebersamaan itu meninggalkan kesan yang dalam dan akan selalu penulis kenang dengan hangat.
17. Teruntuk PCS yaitu, Wina, Ade, Filza, dan Ria. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan saling dukung selama proses bimbingan skripsi. Terima kasih telah menjadi teman berbagi informasi, diskusi, menunggu giliran bimbingan, serta tempat berbagi keluh kesah. Semoga perjuangan kita berbuah hasil terbaik dan menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar ke depan.
18. Teman-teman Ekonomi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah berjuang dan berprogres bersama selama masa perkuliahan di Jurusan Ekonomi Pembangunan. Semoga sukses selalu.

19. Terkhusus diriku sendiri, Septiana Tri Susanti, Terima kasih telah bertahan sejauh ini, meski tidak selalu mudah. Terima kasih telah tetap berjalan meski kadang merasa lelah, ragu, dan ingin menyerah. Terima kasih telah percaya bahwa setiap proses, sekecil apa pun, adalah bagian penting dari perjalanan ini. Semoga langkah ini menjadi awal dari keberanian yang lebih besar untuk menghadapi dunia yang sesungguhnya.

Bandar Lampung, 29 Juli 2025

Penulis

Septiana Tri Susanti

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Strain	14
2.1.2 Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional)	14
2.1.3 Teori Human Capital	15
2.1.4 Kriminalitas	16
2.1.5 Ketimpangan Pendapatan	19
2.1.6 Kemiskinan	22
2.1.7 Pendidikan	23
2.1.8 Hubungan Antara Variabel	24
2.2 Tinjauan Empiris	26
2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Hipotesis	29
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis dan Sumber Data	30
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Definisi Operasional Variabel	30
3.4 Metode Analisis Data	32

3.5 Uji Diagnosa.....	33
3.6 Uji Validitas Instrumen	35
3.7 Generalized Method of Moment (GMM).....	37
3.8 Uji Hipotesis.....	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	40
4.2 Uji Diagnosa.....	42
4.2.3 Uji Validitas Instrumen	44
4.3 Hasil Estimasi Model Statis	46
4.6 Hasil Estimasi Model SYS-GMM.....	47
4.7 Uji Hipotesis.....	48
4.7.1 Uji z-Statistik	48
4.7.2 Uji Wald.....	49
4.8 Pembahasan Penelitian	50
4.8.1 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Indonesia.....	50
4.8.2 Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Indonesia...	52
4.8.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Indonesia	56
4.9 Robustness Test.....	59
V. SIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2. Deskripsi Data.....	30
Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas	42
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas	43
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas	43
Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi	44
Tabel 8. Hasil Uji Hansen	45
Tabel 9. Hasil Uji Arellano-Bond	46
Tabel 10. Hasil Uji REM	46
Tabel 11. Hasil Estimasi Two-step SYS-GMM.....	47
Tabel 12. Hasil Uji z-Statistik.....	49
Tabel 13. Hasil Uji Wald	50
Tabel 14. Hasil Estimasi 5 Jenis Kejahatan	60

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Rata-rata Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Indonesia Tahun 2014-2023	3
Gambar 2. Rata-rata Indeks Gini di Indonesia Tahun 2014-2023	5
Gambar 3. Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2014-2023...	7
Gambar 4. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Indonesia Tahun 2014-2023	9
Gambar 5. Kurva Lorenz.....	20
Gambar 6. Estimasi Koefisien Gini	21
Gambar 7. Kerangka Pemikiran.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Penelitian.....	73
Lampiran 2. Data 5 Jenis Kejahatan	80
Lampiran 3. Analisis Statistik Deskriptif.....	91
Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas.....	91
Lampiran 5. Hasil Uji Multikolinearitas	91
Lampiran 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	91
Lampiran 7. Hasil Uji Autokorelasi	92
Lampiran 8. Hasil Uji Hansen.....	92
Lampiran 9. Hasil Uji Arellano-Bond.....	92
Lampiran 10. Hasil Uji Chow	92
Lampiran 11. Hasil Uji Hausman	93
Lampiran 12. Hasil Uji LM.....	93
Lampiran 13. Hasil Uji REM	94
Lampiran 14. Hasil Estimasi Two-step SYS-GMM	94
Lampiran 15. Hasil Estimasi Pencurian Dengan Pemberatan.....	95
Lampiran 16. Hasil Estimasi Pencurian Biasa	95
Lampiran 17. Hasil Estimasi Penipuan	96
Lampiran 18. Hasil Estimasi Penganiayaan.....	96
Lampiran 19. Hasil Estimasi Kejahatan Narkotika.....	97

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang pesat, ditandai dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang, mulai dari ideologi hingga ekonomi, telah membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Imbasnya, nilai-nilai tradisional mulai terkikis, digantikan oleh orientasi materialistik dan hedonistik. Banyak manusia cenderung mengejar kesenangan instan dan kekayaan materi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Kondisi ini semakin diperparah oleh kompleksitas kehidupan modern yang menuntut masyarakat untuk terus beradaptasi dengan cepat. Tekanan untuk mencapai kesuksesan materi dan sosial seringkali memicu kecemasan dan kebingungan, bahkan mendorong sebagian orang untuk bertindak di luar batas hukum demi memenuhi ambisi semata. Ketidakseimbangan antara keinginan dan kemampuan, serta kurangnya keterampilan yang memadai, menjadi salah satu faktor utama yang memicu tindakan kriminal (Wicaksono & Suharto, 2023).

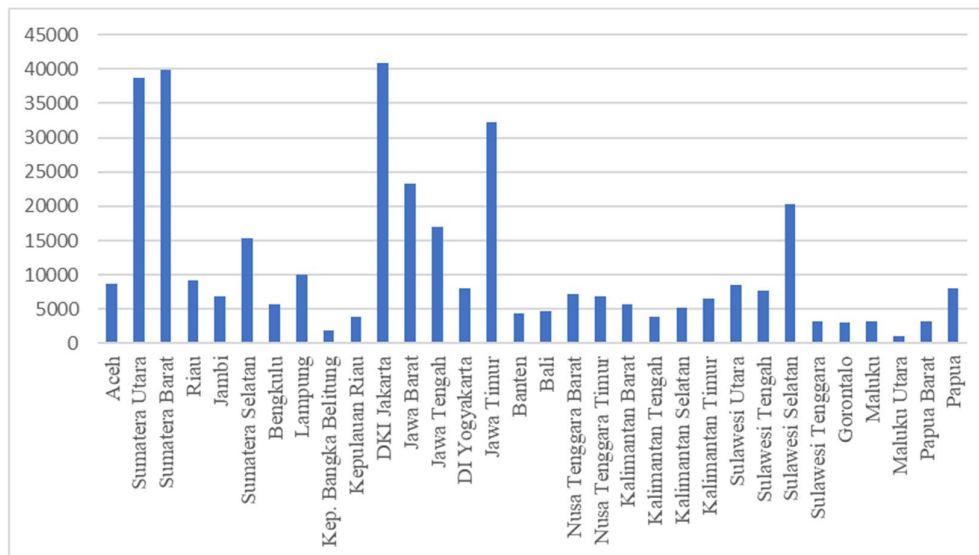
Kriminalitas atau tindakan kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum, norma, dan undang-undang yang berlaku (Winda & Sentosa, 2021). Tindakan kejahatan akan selalu ada dan sulit dihilangkan karena dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan aktivitas rutin di titik rawan kejahatan (He et al., 2016). Menurut Ivaschenko et al. (2012) dalam Sugiharti et al. (2023) kriminalitas menjadi masalah umum bagi masyarakat di dunia karena memiliki berbagai dampak pada perekonomian, sosial dan politik. Selain itu, tindak kejahatan ini menyebabkan kerugian materi, penderitaan fisik, kerusakan moral hingga gangguan psikologis bagi korban (Frieze et al., 1987). Kejahatan yang terjadi cukup beragam, mulai dari kejahatan mencuri hingga kejahatan pembunuhan.

Dalam perspektif ekonomi, kriminalitas sering dikaitkan dengan teori pilihan rasional yang dipopulerkan oleh Gary Becker (1956). Becker menjelaskan bahwa kriminalitas dapat dilihat sebagai keputusan ekonomi yang dibuat oleh seseorang yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari melakukan kejahatan. Menurut teori ini, seseorang akan memilih untuk melakukan tindak kriminal jika selisih antara manfaat yang diperoleh dari kejahatan dan sanksi pidana lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari pekerjaan yang legal (Sugiharti et al., 2023).

Kriminalitas menjadi permasalahan umum yang dihadapi setiap negara di seluruh dunia, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara miskin, termasuk salah satunya Indonesia (Soraya et al., 2024). Kejahatan tidak hanya berdampak pada keamanan masyarakat, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Tingkat rasa aman pada setiap masyarakat ditentukan oleh tingkat tindak pidana, semakin rendah angka tindak pidana maka semakin tinggi pula rasa aman (Socha, 2021).

Menurut *Global Organized Crime Index (GOCI) 2023*, Indonesia mengalami peningkatan skor kriminalitas sebesar 0,48 poin, mencapai 6,85 poin, yang menempatkannya di peringkat ke-20 dari 193 negara yang disurvei, sedangkan skor resiliensi (tingkat penyelesaian masalah) mengalami penurunan sebesar 0,08 poin menjadi 4,25 dan menjadi peringkat ke-123 dengan skor resiliensi terendah. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat kedua setelah Myanmar dalam hal tingkat kriminalitas, sementara skor resiliensinya yang rendah menempatkannya di posisi keenam di kawasan tersebut (Prasastisiwi, 2024).

Berdasarkan statistik kriminalitas, pada tahun 2023, jumlah kejahatan mencapai angka 584.991 kasus, meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 372.965 kasus. Pada tahun 2023, jenis tindak kejahatan dengan jumlah kasus tertinggi meliputi pencurian dengan pemberatan (curat) yang mencapai 62.872 kasus, diikuti oleh tindak penganiayaan sebanyak 51.106 kasus, pencurian biasa sebanyak 49.546 kasus, penipuan atau perbuatan curang yang tercatat sebanyak 48.609 kasus, serta kejahatan terkait narkoba dan psikotropika mencapai 39.496 kasus.



Sumber: *Badan Pusat Statistik 2025, diolah*

Gambar 1. Rata-rata Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Indonesia Tahun 2014-2023

Pada Gambar 1, data kriminalitas yang dilaporkan menurut provinsi menunjukkan adanya variasi diberbagai wilayah Indonesia dan sangat timpang sekali. DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan rata-rata jumlah kasus kriminalitas yang dilaporkan mencapai 40.960,5 kasus. Tingginya angka ini tidak lepas dari status Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat aktivitas ekonomi, sosial, serta pemerintahan. Kepadatan penduduk yang tinggi, urbanisasi yang masif, serta kompleksitas sosial yang tinggi menjadi faktor-faktor yang mendorong tingginya tingkat kriminalitas di wilayah ini. Selain Jakarta, provinsi Sumatera Barat (39.854,6 kasus), Sumatera Utara (38.705,5 kasus), dan Jawa Timur (32.186,4 kasus) juga mencatat angka kriminalitas yang tinggi, menunjukkan bahwa wilayah dengan populasi besar dan aktivitas ekonomi yang tinggi cenderung memiliki angka kriminalitas yang lebih besar.

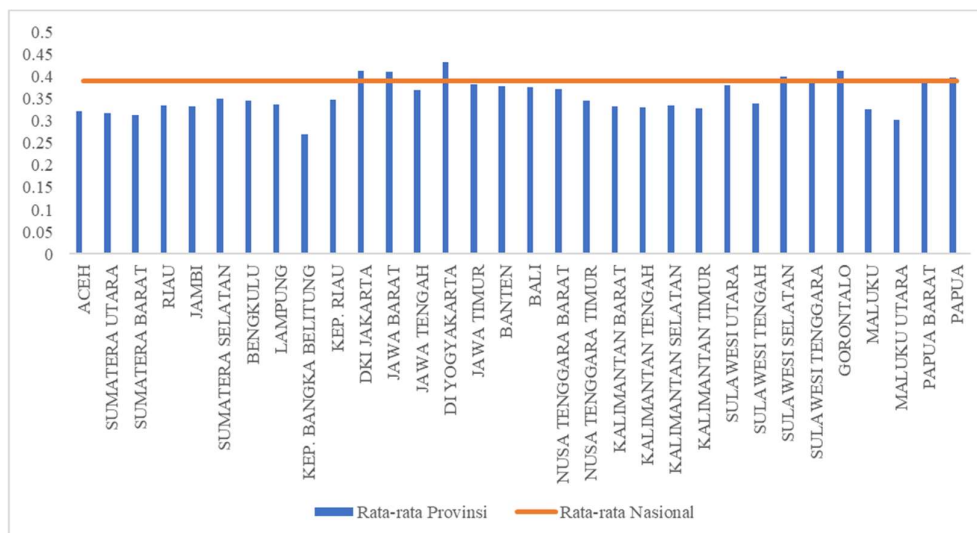
Sebaliknya, beberapa provinsi menunjukkan tingkat kriminalitas yang relatif rendah. Maluku Utara menempati posisi terendah dengan hanya 1.067,5 kasus, diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung (1.947,7 kasus), Sulawesi Tenggara (3.272 kasus), dan Gorontalo (2.983,9 kasus). Rendahnya angka ini dapat disebabkan oleh faktor berupa jumlah penduduk yang lebih sedikit, aktivitas sosial-ekonomi yang tidak terlalu padat, atau masih terbatasnya pelaporan dan pencatatan kasus kriminal di daerah-daerah tersebut. Namun, angka rendah ini juga perlu ditinjau lebih lanjut

apakah mencerminkan kondisi sosial yang aman atau justru adanya kekurangan dalam sistem pelaporan dan penegakan hukum.

Perbedaan rata-rata jumlah kejahatan antara provinsi-provinsi ini dapat dipengaruhi oleh faktor geografis, jumlah penduduk, dan kondisi ekonomi. Pada dasarnya kejahatan timbul akibat karakter manusia yang dilatar belakangi masalah ekonomi (ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan sebagainya), kondisi lingkungan, faktor biologis (umur,usia,jenis kelamin, mental, dan sebagainya), dan nafsu serta emosi yang tak terkendali (Hardianto, 2009a).

Menurut Sugiharti et al. (2023) ketimpangan pendapatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kriminalitas. Ketimpangan pendapatan dapat memicu berbagai reaksi sosial negatif berupa kecemburuan, frustrasi, dan bahkan tindakan agresi yang ditujukan kepada yang memiliki lebih banyak sumber daya (Sugiharti et al., 2022). Ketimpangan pendapatan juga dapat menciptakan lingkungan sosial yang tidak kondusif, di mana yang merasa kurang beruntung secara ekonomi dan sosial lebih cenderung untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Selain itu, ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan berdampak pada keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan (Mardinsyah & Sukartini, 2020).

Dalam penelitian Simanungsong (2013) ketimpangan memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas. Meningkatnya ketimpangan pendapatan memperbesar kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan (Kelly, 2000). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kuciswara et al. (2021) juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Hasil penelitian Ilpiyanto & Fujiansyah (2023) menunjukkan hasil yang berbeda dimana ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas yang artinya peningkatan ketimpangan pendapatan akan menurunkan tingkat kriminalitas.



Sumber: *Badan Pusat Statistik 2025, diolah*

Gambar 2. Rata-rata Indeks Gini di Indonesia Tahun 2014-2023

Indeks Gini merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilainya, menunjukkan semakin timpang distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Berdasarkan data indeks Gini dari seluruh provinsi di Indonesia, terlihat bahwa rata-rata nasional berada pada angka 0,39.

Beberapa provinsi mencatat indeks Gini di atas rata-rata nasional, yang menandakan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dari daerah lainnya. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki indeks Gini tertinggi sebesar 0,43, diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo masing-masing sebesar 0,41. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun wilayah-wilayah tersebut tergolong maju dari sisi pembangunan dan ekonomi, namun distribusi pendapatan antarpenduduknya belum merata. Ketimpangan ini bisa disebabkan oleh dominasi sektor informal, ketimpangan upah antarpekerja, serta konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu saja.

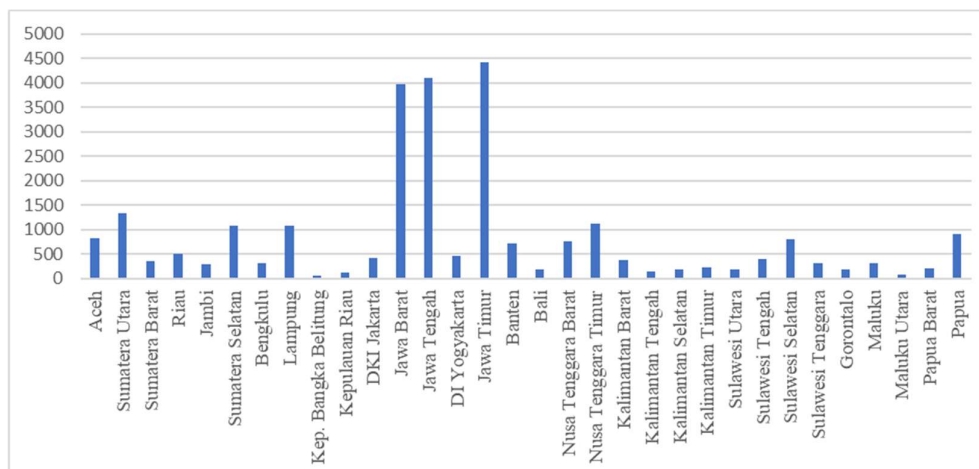
Sebaliknya, sejumlah provinsi memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Kepulauan Bangka Belitung mencatat indeks Gini terendah sebesar 0,27, diikuti oleh Maluku Utara (0,30) dan Sumatera Barat (0,31). Rendahnya nilai indeks Gini di daerah-daerah tersebut bisa diartikan sebagai indikasi distribusi pendapatan yang lebih merata, meskipun tidak selalu

berarti bahwa pendapatan masyarakat di wilayah tersebut tinggi. Dalam beberapa kasus, rendahnya indeks Gini juga dapat mengindikasikan tingkat pendapatan yang beragam di level yang rendah.

Berdasarkan data tersebut, indeks gini tertinggi banyak terdapat di Pulau Jawa. Hal ini terkait dengan tingkat urbanisasi yang lebih tinggi di Pulau Jawa serta konsentrasi aktivitas ekonomi di beberapa pusat kota besar. Tingkat ketimpangan yang tinggi memiliki implikasi yang luas bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Ketimpangan yang tinggi seringkali diiringi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Kemiskinan, sebagai kondisi sosial ekonomi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, seringkali dikaitkan dengan tingginya angka kriminalitas. Situmorang (2024) menyatakan bahwa kemiskinan menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan, karena kebutuhan untuk bertahan hidup dapat mendorong untuk melakukan tindakan kriminalitas sebagai upaya menghindari kemiskinan. Kasim dan Hendra (2023) juga menjelaskan bahwa masyarakat miskin melakukan tindakan kriminal karena tidak punya pilihan lain dan terikat oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, terbatasnya akses terhadap peluang, dan ketidaksetaraan dalam menikmati fasilitas umum dapat memicu frustrasi mendalam pada orang miskin, yang pada akhirnya mendorong terjadinya tindakan kriminal (Wicaksono & Suharto, 2023).

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Suharto (2023); Nahe et al. (2024); dan Silvia & Ikhsan (2021) menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas yang artinya peningkatan kemiskinan akan meningkatkan tindak kriminalitas. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardinsyah & Sukartini (2020) dimana kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya tindak kriminalitas. Penelitian yang dilakukan Soraya et al. (2024) juga menunjukkan adanya hubungan negatif kemiskinan terhadap kriminalitas.



Sumber: *Badan Pusat Statistik 2025, diolah*

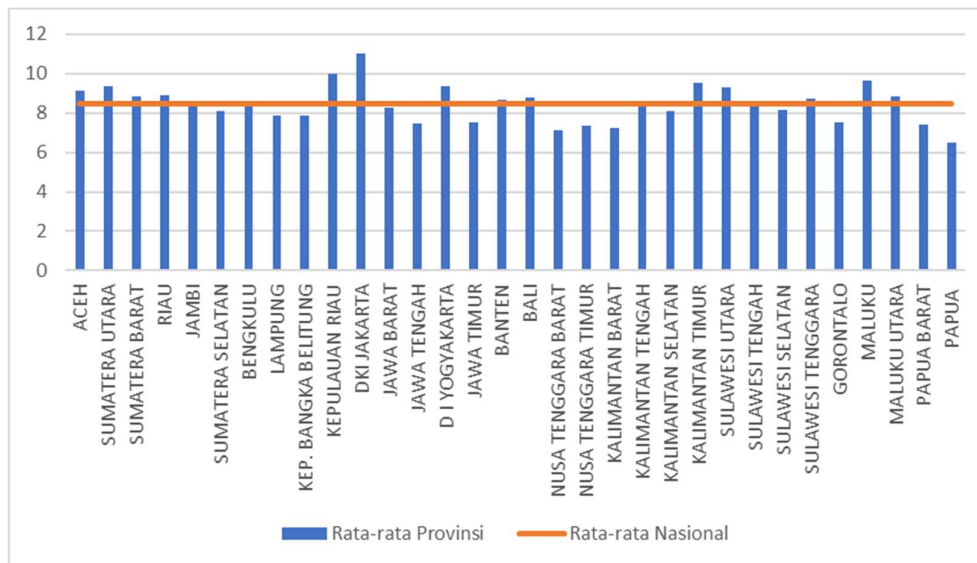
Gambar 3. Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2014-2023

Pada Gambar 3, rata-rata jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat timpang antar provinsi. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa menempati posisi teratas dalam hal jumlah penduduk miskin. Jawa Timur mencatat angka tertinggi dengan rata-rata 4.427.827 jiwa, disusul oleh Jawa Tengah sebanyak 4.101.925 jiwa, dan Jawa Barat dengan 3.965.757 jiwa. Sementara itu, sejumlah provinsi memiliki angka kemiskinan yang relatif rendah. Kepulauan Bangka Belitung hanya mencatat 69.499 jiwa, diikuti oleh Maluku Utara (81.843 jiwa), dan Kepulauan Riau (131.030 jiwa). Rendahnya jumlah penduduk miskin di wilayah ini bisa disebabkan oleh populasi yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau dengan populasi terbesar. Masyarakat miskin seringkali memiliki akses yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasar meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan berkualitas, dan kesehatan (Wicaksono & Suharto, 2023). Kondisi ini mendorong masyarakat miskin untuk mencari alternatif penghasilan, termasuk melalui tindakan kriminal.

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk tingkat kriminalitas. Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena memberikan bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan memperbesar peluang kerja, sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang pada akhirnya menurunkan

tingkat kejahatan (Soraya et al., 2024). Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki peluang kerja yang lebih terbatas dan pendapatan yang lebih rendah akibat terbatasnya kemampuan yang dimiliki. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral. Menurut Situmeang (2021) pendidikan menjadi sarana untuk mengetahui yang baik dan buruk. Seseorang yang memiliki pendidikan yang baik cenderung lebih sadar akan hukum dan konsekuensi serta mampu mengendalikan diri agar tidak melakukan tindak kejahatan dibandingkan orang lain yang berpendidikan rendah.

Penelitian oleh Burt (2005) menunjukkan hubungan negatif antara pendidikan dan kriminalitas, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan. Sejalan dengan penelitian Burt, hasil penelitian oleh Sugiharti et al. (2023) menunjukkan hubungan pendidikan negatif terhadap kriminalitas. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian Murialti & Hadi (2023) menunjukkan hubungan positif pendidikan terhadap kriminalitas. Hal ini dikarenakan jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak mencukupi untuk menyerap tenaga kerja berpendidikan yang banyak sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan berpotensi memicu tindakan kriminal (Murialti & Hadi, 2023). Sedangkan Wicaksono & Suharto (2023) mengungkapkan bahwa seseorang yang berpendidikan cenderung untuk melakukan kejahatan dengan lebih cerdas dan efisien melalui perkembangan teknologi saat ini.



Sumber: *Badan Pusat Statistik 2024, diolah*

Gambar 4. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Indonesia Tahun 2014-2023

Tingkat pendidikan di suatu wilayah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia dan potensi pembangunan ekonomi. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada Gambar 5, data yang ditampilkan menunjukkan bahwa secara nasional, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia berkisar di angka 8,4 tahun, yang berarti secara umum masyarakat Indonesia menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Namun, lebih dari setengah provinsi di Indonesia memiliki rata-rata lama sekolah yang masih berada di bawah angka nasional tersebut, menandakan bahwa pemerataan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi persoalan yang serius di berbagai wilayah.

DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan rata-rata lama sekolah sebesar 11,031 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Jakarta telah menyelesaikan pendidikan menengah atas dan sebagian bahkan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Fenomena ini mencerminkan tingginya akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai, baik dari sisi infrastruktur maupun tenaga pendidik, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Selain Jakarta, provinsi Kepulauan Riau, Maluku, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara juga menunjukkan rata-rata lama sekolah yang tinggi, yaitu di atas 9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-

daerah tersebut telah mencapai tingkat pendidikan yang relatif lebih baik dan merata, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap produktivitas tenaga kerja dan pembangunan daerah.

Di sisi lain, Papua menjadi provinsi dengan rata-rata lama sekolah terendah, yaitu hanya 6,496 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk di Papua belum menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. Rendahnya angka ini dapat disebabkan oleh berbagai kendala struktural yakni keterbatasan akses terhadap sekolah, kurangnya tenaga pengajar, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat yang membatasi kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat juga menunjukkan angka rata-rata lama sekolah yang tergolong rendah, berada di bawah 7,5 tahun. Ketimpangan ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam pembangunan sektor pendidikan yang merata dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Rendahnya rata-rata lama sekolah di berbagai daerah tidak hanya mencerminkan keterbatasan dalam akses pendidikan, tetapi juga berdampak langsung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi daya saing regional, serta memperbesar kesenjangan sosial antarwilayah. Oleh karena itu, peningkatan rata-rata lama sekolah harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional, terutama melalui kebijakan yang mendorong pemerataan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran, serta pemberian insentif dan bantuan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun fondasi sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Masih terdapat sejumlah provinsi, khususnya yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang berada di atas rata-rata nasional. Ketimpangan ini mencerminkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Kondisi semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial dan meningkatkan potensi terjadinya konflik, termasuk tindakan kriminal. Ketika masyarakat berpendapatan rendah merasa terpinggirkan secara ekonomi dan sosial, masyarakat akan terdorong untuk mencari jalan alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya melalui tindakan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kriminalitas, sehingga perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini terkait bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia.
2. Di Indonesia jumlah penduduk miskin antar provinsi masih sangat timpang sekali, beberapa provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kemiskinan, sebagai kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, memiliki dampak signifikan terhadap munculnya tindakan kriminalitas. Ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mengakses kebutuhan dasar diantaranya makanan, tempat tinggal, dan pendidikan sering kali mendorong masyarakat miskin mencari alternatif penghasilan, termasuk melalui tindakan kriminal. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat kemiskinan dan angka kriminalitas, sehingga perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini terkait bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia.
3. Tingkat pendidikan yang rendah, sebagaimana tercermin dari rata-rata lama sekolah yang masih berada di bawah rata-rata nasional di sebagian besar provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa akses dan kualitas pendidikan

belum merata. Rendahnya pendidikan ini dapat berkontribusi pada meningkatnya risiko terjadinya tindak kriminal, karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran sosial yang dapat mengarahkan seseorang pada perilaku menyimpang. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia yang merupakan salah satu isu yang perlu dikaji lebih mendalam.
2. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia yang merupakan salah satu isu yang perlu dikaji lebih mendalam.
3. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, pendidikan dan tingkat kriminalitas di Indonesia, serta memperkaya literatur dalam bidang ekonomi pembangunan dan kriminalitas.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan distribusi pendapatan yang lebih merata guna menekan kriminalitas. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi lembaga sosial dalam program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini

juga menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan mengenai pemerataan akses dan kualitas pendidikan untuk mendorong pembangunan yang inklusif serta memberikan rekomendasi strategis terkait peningkatan layanan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kriminalitas di wilayah kurang berkembang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Strain

Teori Strain dikemukakan oleh Robert K. Merton pada tahun 1938 untuk menjelaskan penyimpangan perilaku di masyarakat Amerika. Merton menjelaskan mengapa kemiskinan dan ketimpangan seringkali dikaitkan dengan tingginya angka kejahatan. Merton mengungkapkan bahwa masyarakat Amerika sangat menekankan pentingnya kesuksesan, yang biasanya diukur dari harta kekayaan. Untuk mencapai tujuan ini, ada cara-cara legal yang telah disahkan. Namun, tidak semua orang dapat mencapai kesuksesan melalui cara yang sah. Akibatnya, beberapa orang, terutama dari kelas bawah dan minoritas, memilih untuk melanggar hukum demi meraih tujuan tersebut (Effendi, 2017).

Struktur sosial masyarakat Amerika menjadi akar permasalahan penyimpangan karena membatasi akses untuk mendapatkan tujuan melalui cara yang sah antara lain pendidikan tinggi, koneksi keluarga, ras, bekerja keras, bahkan bahasa. Hal ini membebani masyarakat kelas bawah, karena seseorang harus benar-benar berbakat atau beruntung untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan Teori Strain, pada dasarnya seseorang mematuhi hukum, namun tekanan besar yang muncul dari ketidaksesuaian antara tujuan dan cara yang tersedia membuat sebagian orang melakukan kejahatan (Effendi, 2017).

2.1.2 Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional)

Gary S. Becker, seorang ekonom terkenal, mengembangkan pendekatan ekonomi terhadap perilaku kriminal dalam karyanya yang berjudul "*Crime and Punishment: An Economic Approach*" (1968). Dalam karya ini, Becker melihat kejahatan bukan hanya sebagai masalah moral atau sosial, melainkan sebagai keputusan rasional

yang diambil seseorang berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat. Jika manfaat yang didapat lebih besar daripada risiko yang harus ditanggung, maka kejahatan dianggap sebagai pilihan yang rasional.

Pendekatan ini mengubah cara pandang terhadap perilaku kriminal dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Becker (1968) menjelaskan bahwa setiap orang bebas membuat keputusan berdasarkan penilaian rasional atas dampak dari tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, kejahatan terjadi karena seseorang membandingkan potensi keuntungan, yakni uang atau kepuasan, dengan risiko yang harus ditanggung, yakni hukuman penjara atau denda. Artinya, perilaku kriminal dapat dijelaskan dengan logika yang sama dengan keputusan ekonomi lainnya.

Becker (1968) juga menyoroti pentingnya sistem hukum dan penegakan hukum dalam memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan. Becker berpendapat bahwa tingkat kejahatan bisa dikurangi dengan meningkatkan risiko atau biaya bagi pelaku kejahatan, misalnya melalui penegakan hukum yang lebih ketat atau hukuman yang lebih berat. Dengan kata lain, jika risiko atau kerugian akibat kejahatan lebih besar daripada keuntungannya, orang cenderung memilih untuk tidak melakukan tindakan ilegal.

2.1.3 Teori Human Capital

Teori Human Capital yang dipelopori oleh Gary S. Becker menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas seseorang. Pendidikan, sebagai salah satu komponen utama modal manusia, berperan penting dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi risiko pengangguran. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan sering kali dikaitkan dengan peluang kerja yang terbatas, yang dapat mendorong seseorang untuk mencari alternatif pendapatan melalui aktivitas ilegal. Dalam konteks ini, pengangguran menjadi variabel penting yang menjembatani hubungan antara pendidikan dan kriminalitas. Tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan masyarakat dengan keterampilan rendah, menciptakan tekanan ekonomi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan kriminal. Sebaliknya, investasi dalam pendidikan dan penciptaan lapangan kerja dapat menurunkan insentif untuk

melakukan kejahatan dengan meningkatkan biaya peluang (*opportunity cost*) dari keterlibatan dalam aktivitas ilegal.

2.1.4 Kriminalitas

Kriminalitas adalah fenomena sosial yang mencakup berbagai bentuk tindakan melanggar hukum yang terjadi di masyarakat. Menurut Wojowasito et al. (1982) kriminalitas berasal dari bahasa Inggris "*crime*" yang artinya kejahatan dan "*criminal*" yang artinya jahat atau penjahat sehingga kriminalitas dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dianggap menentang norma-norma hukum yang berlaku. Menurut Soekanto (2011), kriminalitas tidak hanya mencakup tindakan yang secara eksplisit melanggar hukum tertulis, tetapi juga perbuatan yang secara implisit bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Bonger (1916), kriminalitas tidak dapat dilihat hanya sebagai perilaku seseorang, tetapi juga harus dipahami dalam konteks struktural yang lebih luas. Dalam hal ini, perilaku kriminal merupakan respons terhadap tekanan sosial yang berasal dari kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan (Bonger, 1916).

Menurut Soesilo dalam Purwanti & Widyaningsih (2019) kejahatan dapat dipahami dalam dua perspektif yang berbeda, yaitu secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, kejahatan didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar hukum pidana yang berlaku. Di sisi lain, dalam perspektif sosiologi, kejahatan mencakup semua perilaku manusia yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum.

Menurut Elliott (1952) kejahatan adalah segala perbuatan terlarang dan dipidana oleh negara. Elliott (1952) mengklasifikasikan kejahatan menjadi 4 jenis, diantaranya:

1. Kejahatan sebagai masalah sosial
Sosiologi menempatkan kejahatan sebagai permasalahan mendesak dalam tatanan sosial. Tindakan kriminal dapat mengancam fondasi pemerintahan, hukum, ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kejahatan sebagai masalah psikologis

Kejahatan juga dapat dilihat sebagai hasil dari masalah psikologis yang dialami oleh pelaku. Masalah ini dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan pelaku kejahatan.

3. Kejahatan sebagai masalah psikososial

Psikologi memandang kejahatan sebagai perilaku yang memiliki masalah psikologis dan sosial sehingga perbuatannya menyimpang dari norma sosial. Meskipun penjahat pada dasarnya sama dengan orang biasa, tindakan kriminal yang berulang dapat memicu perasaan antisosial dan kegagalan dalam beradaptasi dengan aturan masyarakat.

4. Kejahatan sebagai masalah hukum dan sosial

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban hukum. Pelanggaran hukum dapat berakibat pada sanksi berupa denda, pengusiran, pencabutan kebebasan, bahkan hukuman mati.

Freda Adler dalam (Effendi, 2017) mengklasifikasikan kejahatan sebagai berikut:

1. Kejahatan dengan kekerasan, diantaranya:
 - a. Pembunuhan yang meliputi, pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, maupun membunuh dengan kealpaan (pelaku tidak sengaja menyebabkan kematian pada korban);
 - b. Kejahatan yang berhubungan dengan keluarga yakni menyakiti pasangan, kekerasan terhadap anak-anak dan yang lebih tua;
 - c. Kejahatan dengan kebencian;
 - d. Kekerasan di sekolah;
 - e. Milisi;
 - f. Pemerkosaan dan penyerangan seksual;
 - g. Penculikan;
 - h. Penyerangan;
 - i. Perampokan; dan
 - j. Terorisme.

2. Kejahatan terhadap hak milik, diantaranya:
 - a. Kejahatan dengan teknologi tinggi;
 - b. Pencurian;
 - c. Penipuan;
 - d. Penadahan; dan
 - e. Pembakaran.
3. Kejahatan dengan organisasi, diantaranya:
 - a. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*);
 - b. Kejahatan korporasi; dan
 - c. Kejahatan teroganisir.
4. Kejahatan yang berhubungan dengan minuman keras, seksualitas, dan narkoba, diantaranya:
 - a. Minuman keras (alkohol)
 - b. Prostitusi;
 - c. Pornografi; dan
 - d. Penyalahgunaan narkoba.

Badan Pusat Statistik (2023) mengklasifikasikan kejahatan menjadi 9 kategori berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang digagas oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) diantaranya:

1. Kejahatan terhadap nyawa, meliputi:
 - a. Pembunuhan
2. Kejahatan terhadap fisik/badan, meliputi:
 - a. Penganiayaan berat
 - b. Penganiayaan ringan
 - c. Kekerasan dalam rumah tangga
3. Kejahatan terhadap kesusilaan, meliputi:
 - a. Perkosaan
 - b. Pencabulan
4. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang, meliputi:
 - a. Penculikan

- b. Mempekerjakan anak dibawah umur
- 5. Kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan
 - a. Pencurian dengan kekerasan
 - b. Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (senpi)
 - c. Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (sajam)
- 6. Kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan, meliputi:
 - a. Pencurian
 - b. Pencurian dengan pemberatan
 - c. Pencurian kendaraan bermotor
 - d. Pengrusakan/penghancuran barang
 - e. Pembakaran dengan sengaja
 - f. Penadahan
- 7. Kejahatan terkait narkoba, meliputi:
 - a. Narkoba dan psikotropika
- 8. Kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi, meliputi:
 - a. Penipuan/perbuatan curang
 - b. Penggelapan
 - c. Korupsi
- 9. Kejahatan terhadap ketertiban umum

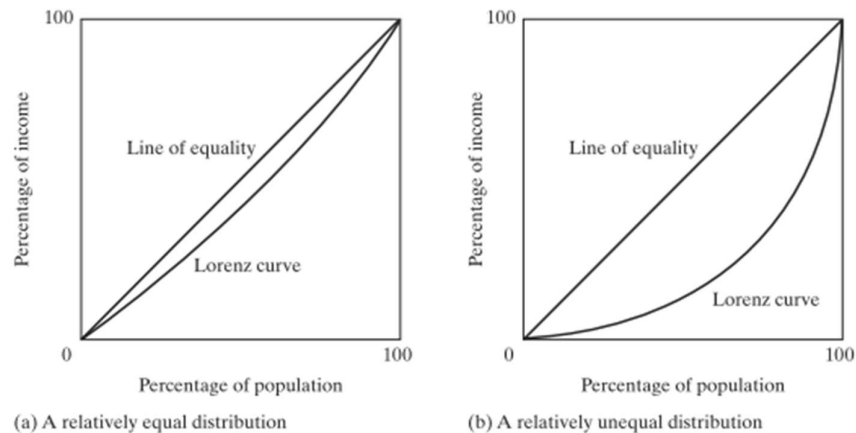
Tingkat kriminalitas (*crime rate*) menurut BPS Indonesia (2023) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kriminalitas} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk Tahun } t} \times 100.000$$

2.1.5 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merujuk pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara masyarakat dalam suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini, yang mengukur distribusi pendapatan dalam populasi. Perbedaan yang sangat besar antara orang kaya dan miskin dapat menyebabkan konflik sosial. Ketika sebagian besar kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir orang, kelompok miskin akan merasa diperlakukan tidak adil. Perasaan tidak puas tersebut

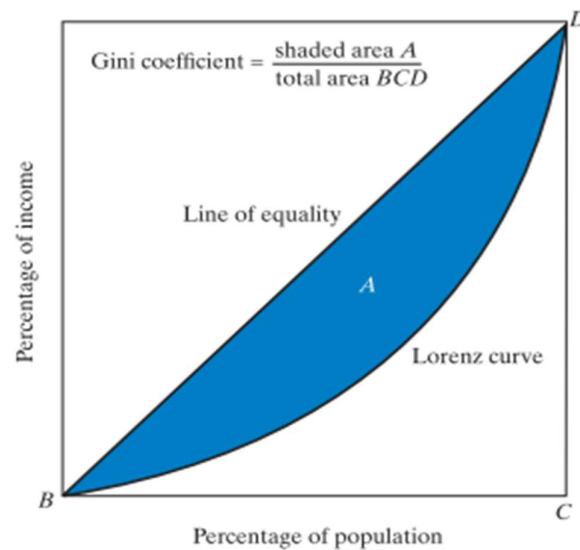
dapat memicu berbagai bentuk konflik, termasuk tindakan kriminal (Sugiharti et al., 2022). Dalam situasi tersebut, tindakan kriminal seringkali menjadi cara bagi kelompok yang merasa tertindas untuk menyuarakan ketidakpuasan.



Sumber: *Todaro & Smith (2020:225)*

Gambar 5. Kurva Lorenz

Indeks gini adalah alat untuk mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan berdasarkan kurva Lorenz (Todaro & Smith, 2020). Kurva Lorenz menggambarkan hubungan antara persentase penerima pendapatan dengan persentase total pendapatan yang diterima oleh penduduk dalam periode tertentu. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah penduduk penerima pendapatan, sementara sumbu vertikal menggambarkan bagian dari total pendapatan yang diterima setiap kelompok. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal yang menunjukkan distribusi pendapatan sempurna, semakin besar tingkat ketimpangannya. Sebaliknya, semakin mendekati garis diagonal, semakin kecil ketimpangan yang terjadi.



Sumber: *Todaro & Smith (2020:226)*

Gambar 6. Estimasi Koefisien Gini

Untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan pendapatan relatif di suatu negara, dapat digunakan rasio antara luas area yang terletak di antara garis diagonal dan kurva Lorenz, dibandingkan dengan luas total segitiga tempat kurva tersebut berada. Pada Gambar 6, rasio tersebut ditunjukkan sebagai perbandingan antara area yang diarsir A dengan luas segitiga BCD. Ukuran ini dikenal sebagai rasio konsentrasi Gini atau koefisien Gini.

Selain melalui kurva Lorenz, Indeks gini (*gini ratio*) dapat dirumuskan sebagai berikut BPS (2013):

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f p_i (F c_i - F c_{i-1})$$

di mana:

GR = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

$f p_i$ = Frekuensi penduduk dalam kelas pendapatan ke-i

$F c_i$ = Frekuensi kumulatif dari total pendapatan dalam kelas pendapatan ke-i

$F c_{i-1}$ = Frekuensi kumulatif dari total pendapatan dalam kelas pendapatan ke-(i-1)

Indeks gini memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai tersebut, semakin besar ketimpangan dalam distribusi pengeluaran antar kelompok masyarakat berdasarkan kategori pengeluaran. Penilaian tingkat ketimpangan berdasarkan indeks gini diklasifikasikan sebagai berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makroekonomi, LPEM-FEUI, 1995) dalam (BPS, 2009):

- a. $GR < 0,4$ menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah.
- b. $0,4 \leq GR \leq 0,5$ mencerminkan tingkat ketimpangan sedang (moderat).
- c. $GR > 0,5$ mengindikasikan tingkat ketimpangan yang tinggi.

2.1.6 Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup secara layak, yang diukur melalui garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini mencakup kebutuhan minimal untuk konsumsi makanan dan non-makanan. Seseorang dianggap miskin jika pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan tersebut.

Todaro dan Smith (2015) menekankan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi contohnya kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, dan diskriminasi sosial juga berperan penting. Misalnya, anak-anak yang sakit atau tidak bersekolah cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kemiskinan sering kali berkaitan erat dengan kriminalitas. Seseorang yang hidup dalam kemiskinan menghadapi tekanan ekonomi yang berat, yang sering kali menjadi penyebab untuk melakukan tindakan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam banyak kasus, tindakan kriminal misalnya pencurian, perampokan, dan penjualan barang ilegal adalah akibat dari keterpaksaan ekonomi. Seseorang yang berada dalam situasi ini sering kali merasa tidak memiliki pilihan lain selain melanggar hukum untuk mendapatkan penghasilan.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan sebagai berikut (BPS, 2024a):

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

di mana:

a = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,...,q), y_i < z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika a=0, diperoleh *Head Count Index* (P₀), jika a=1 diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P₁) dan jika a=2 diperoleh indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P₂).

2.1.7 Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan perilaku seseorang dalam masyarakat. Menurut teori modal manusia yang dikemukakan oleh Gary Becker (1993), pendidikan adalah salah satu investasi paling penting yang dapat dilakukan oleh seseorang dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang kuat, yang dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Seseorang yang memiliki akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang ekonomi yang lebih baik, yang pada gilirannya mengurangi motivasi untuk melakukan tindakan kriminal. Penelitian menunjukkan bahwa seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Hal ini karena kurangnya pendidikan sering kali membatasi akses seseorang terhadap pekerjaan yang layak, yang memicu frustrasi dan menyebabkan seseorang untuk mencari alternatif ekonomi melalui tindakan ilegal.

Pendidikan juga mempengaruhi cara seseorang memahami norma-norma sosial dan hukum. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, baik dari segi hukum maupun sosial. Seseorang lebih cenderung mematuhi hukum karena memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang risiko dan hukuman yang dihadapi jika melanggar hukum. Sebaliknya, orang dengan tingkat pendidikan rendah sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem hukum, sehingga lebih rentan terhadap perilaku kriminal.

Selain itu, pendidikan berperan penting dalam membentuk jaringan sosial dan modal sosial yang dapat melindungi seseorang dari kriminalitas. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap jaringan kerja, komunitas yang mendukung, dan sumber daya sosial lainnya yang dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi tanpa harus terlibat dalam kegiatan kriminal. Pendidikan yang baik juga membangun keterampilan kognitif dan sosial yang penting, antara lain kemampuan untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, dan berkomunikasi dengan efektif, yang semuanya berkontribusi pada perilaku yang lebih bertanggung jawab.

2.1.8 Hubungan Antara Variabel

a) Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kriminalitas di suatu daerah. Ketika pendapatan terdistribusi secara tidak merata, orang yang berada di tingkat ekonomi rendah akan merasa tertekan,

sehingga dapat terlibat dalam kegiatan kriminal. Penelitian Ilpiyanto & Fujiansyah (2023) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung mengalami tingkat kriminalitas yang lebih tinggi karena ketidakpuasan dan frustrasi sosial yang dapat memicu tindakan kriminal.

Ketimpangan pendapatan tidak hanya memengaruhi perilaku seseorang, tetapi juga dapat menciptakan kondisi sosial yang mendukung terjadinya kriminalitas. Masyarakat yang tidak setara dalam hal ekonomi cenderung memiliki keterikatan sosial yang lemah, yang dapat mengurangi rasa saling percaya dan meningkatkan potensi konflik. Selain itu, ketidakadilan sosial dapat mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap kebijakan publik yang bertujuan mengurangi kriminalitas, antara lain program-program sosial dan peningkatan sistem keamanan.

b) Kemiskinan terhadap Kriminalitas

Kemiskinan adalah faktor signifikan yang mempengaruhi tingkat kriminalitas. Kemiskinan tidak hanya mencerminkan kekurangan bahan material, tetapi juga kekurangan dalam sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan kelompok yang memiliki pendidikan dan keterampilan, sehingga lebih rentan terlibat dalam kegiatan ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup (Situmorang, 2024). Penelitian Silvia & Ikhsan (2021) menunjukkan bahwa kemiskinan menyebabkan seseorang terlibat dalam tindakan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Misalnya, dalam situasi di mana orang tidak memiliki sumber daya yang cukup akan merasa terpaksa untuk melakukan pencurian atau kejahatan lainnya.

Selain itu, kemiskinan dapat menyebabkan tekanan psikologis yang dapat memicu perilaku kriminal. Seseorang yang merasa putus asa dan tidak memiliki harapan untuk memperbaiki situasi hidup cenderung terlibat dalam perilaku menyimpang. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat kemiskinan di suatu daerah dan tingkat kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan. Kemiskinan berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung munculnya kriminalitas akibat frustrasi sosial dan keterbatasan akses terhadap sumber daya.

c) Pendidikan terhadap Kriminalitas

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kriminalitas. Seseorang yang mendapatkan pendidikan yang baik cenderung memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan menghindari keterlibatan dalam tindakan kriminal (Burt, 2005). Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah berhubungan positif dengan tingkat kriminalitas, di mana orang dengan pendidikan rendah cenderung terlibat dalam kejahatan (Murianti & Hadi, 2023). Pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal.

Selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran seseorang akan hukum dan konsekuensi dari tindakan kriminal. Pendidikan yang baik dapat membantu seseorang memahami nilai-nilai sosial dan norma yang ada, sehingga dapat menghindari perilaku menyimpang. Mardinsyah & Sukartini (2020) menyatakan bahwa peningkatan tingkat pendidikan dapat mengurangi risiko terlibat dalam kejahatan, karena orang yang terdidik cenderung memiliki nilai yang lebih kuat terhadap hukum dan keadilan sosial.

2.2 Tinjauan Empiris

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis/Judul/Tahun	Variabel	Metode	Hasil
Lilik Sugiharti, Rudi Purwono, Miguel Angel Esquivias dan Hilda Rohmawati The Nexus between Crime Rates, Poverty, and Income Inequality: A Case Study of Indonesia (2023)	Tingkat kriminalitas, <i>gini ratio</i> , PDRB, kepadatan penduduk, RLS, investasi dosmetik, FDI, belanja infrastruktur, jumlah penduduk kemiskinan, rata-rata penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, rata-rata indeks	<i>Generalized Method of Moments</i>	PDRB, belanja infrastruktur, <i>gini rasio</i> , kemiskinan, , rata-rata penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, rata-rata indeks kesenjangan kemiskinan, rata-rata indeks keparahan kemiskinan berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan. Sedangkan kepadatan penduduk,

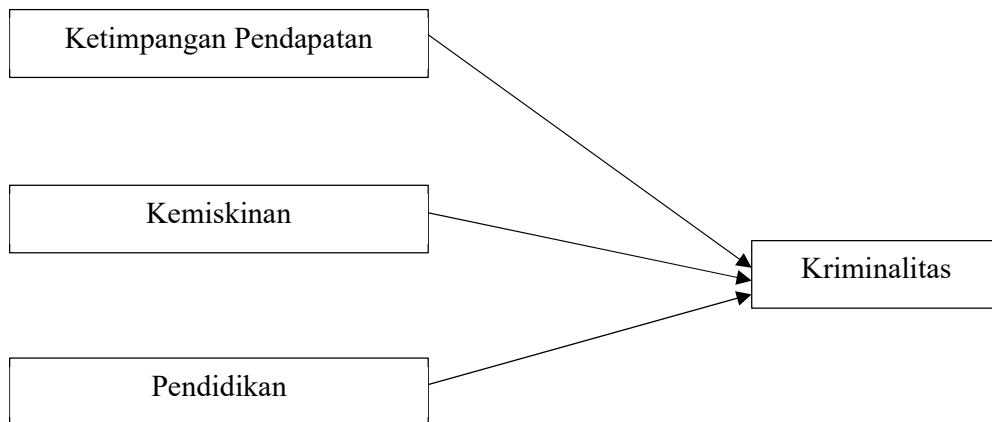
Penulis/Judul/Tahun	Variabel	Metode	Hasil
	kesenjangan kemiskinan, Rata-rata indeks keparahan kemiskinan		pendidikan dan investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan.
Marko Ipiyanto dan Deki Fujiansyah Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2022 (2023)	Kriminalitas, IPM, dan ketimpangan pendapatan	Regresi Data Panel	(IPM) berpengaruh positif dan signifikan sedangkan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas.
Neng Murialti dan Muhammad Fikry Hadi Analisis Tingkat Kriminalitas di Provinsi Dengan Pendekatan Data Panel (2023)	Tingkat kriminalitas, kepadatan penduduk, pendidikan, kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat upah, dan migrasi	Regresi Data Panel	Pendidikan dan migrasi masuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, tingkat upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Sedangkan variabel kepadatan penduduk, kemiskinan dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas
Nadya Soraya, Muhammad Azkia Nurfikri, Ariq Rafi, Muhammad Kurniawan Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran	Kriminalitas, ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka	Regresi Linier Berganda	Ketimpangan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, sedangkan tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh

Penulis/Judul/Tahun	Variabel	Metode	Hasil
Terbuka Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2013-2023 (2024)			negatif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas
Arif Satrio Wicaksono dan Suharto Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (2023)	Kriminalitas, PDRB per kapita, pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan	Regresi Data Panel	Kemiskinan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas sedangkan PDRB dan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel independen (ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pendidikan) yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia. Penggunaan empat variabel tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya kriminalitas baik secara parsial maupun simultan.

Adapun kerangka pemikiran teoritis yang digambarkan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 7. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian empiris, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Diduga ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.

H₂ : Diduga kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.

H₃ : Diduga pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan jenis data yang digunakan berupa data sekunder dalam bentuk data panel. Data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Data panel memberikan keunggulan dengan menganalisis perubahan variabel dari waktu ke waktu (*time series*) serta perbandingan antar wilayah (*cross-section*). Data yang dikumpulkan sejak tahun 2014-2023 pada 32 Provinsi di Indonesia. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 2. Deskripsi Data

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber
Tingkat Kriminalitas	CR	Kasus/100.000 Penduduk	BPS
Ketimpangan Pendapatan	KP	Indeks	BPS
Kemiskinan	POOR	Persen	BPS
Pendidikan	EDU	Tahun	BPS

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan 32 Provinsi di Indonesia dengan data yang lengkap untuk periode 2014 hingga 2023. Penelitian ini berfokus kepada tingkat kriminalitas, ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian merupakan deskripsi yang jelas dan terperinci mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Setiap variabel memiliki makna serta konteks spesifik yang berperan penting dalam mendukung analisis data dan interpretasi hasil. Memahami definisi dari masing-

masing variabel akan memberikan dasar yang kuat bagi peneliti dalam mengevaluasi hubungan antarvariabel dengan lebih efektif. Berikut adalah definisi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kriminalitas (*crime rate*). Tingkat kriminalitas didefinisikan sebagai jumlah kejadian kejahatan yang terjadi dalam suatu wilayah per 100.000 penduduk pada periode tertentu. Variabel tingkat kriminalitas digunakan untuk mengukur seberapa besar risiko atau intensitas kriminalitas di suatu daerah. Semakin tinggi nilai variabel tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi pula tingkat kejahatan di wilayah tersebut. Jenis kejahatan yang terjadi diantaranya pembunuhan, kejahatan fisik, pencabulan, pencurian, penipuan, korupsi, penggunaan/penjualan narkoba, dan kerusakan lingkungan. Dalam penelitian ini, data tingkat kriminalitas diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan diukur dalam satuan kasus per 100.000 penduduk (BPS, 2024b).

2. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pendidikan.

a. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menggunakan Indeks Gini, yaitu ukuran statistik yang menggambarkan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok penduduk dalam suatu wilayah. Indeks ini memiliki rentang antara 0 hingga 1, di mana angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata sempurna, sedangkan angka mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong tindakan kriminal akibat ketidakpuasan atau ketimpangan sosial. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan diukur dalam bentuk indeks.

b. Kemiskinan

Kemiskinan dalam penelitian ini diukur melalui tingkat kemiskinan yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Penduduk miskin didefinisikan sebagai orang yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh BPS. Kemiskinan sering dikaitkan dengan peningkatan potensi kriminalitas karena keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Data tingkat kemiskinan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan diukur dalam satuan persentase.

c. Pendidikan

Pendidikan dalam penelitian ini diukur melalui rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Pendidikan berperan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan memengaruhi perilaku sosial masyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah sering dikaitkan dengan peningkatan risiko terlibat dalam aktivitas kriminal. Data pendidikan diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan diukur dalam satuan tahun.

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Generalized Method of Moment* (GMM) dengan menggunakan analisis regresi data panel. Variabel CR merupakan variabel yang dipengaruhi oleh nilai di masa lalu (*pre-determinant*), sehingga nilai CR pada tahun ini dipengaruhi oleh nilai CR pada tahun sebelumnya (CR_{t-1}) (Sugiharti et al., 2023). Penelitian ini menggunakan *software* Stata sebagai alat bantu pengolahan data.

Fungsi persamaan yang akan diamati pada penelitian ini adalah:

$$CR = f(KP, POOR, EDU)$$

Kemudian, model tersebut dispesifikasikan kembali sebagai berikut:

$$CR_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 CR_{i,t-1} + \beta_2 KP_{i,t} + \beta_3 POOR_{i,t} + \beta_4 EDU_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

$CR_{i,t}$	= Tingkat Kriminalitas (kasus/100.000 penduduk)
$CR_{i,t-1}$	= Tingkat Kriminalitas pada tahun sebelumnya (kasus/100.000 penduduk)
$KP_{i,t}$	= Ketimpangan Pendapatan (indeks)
$POOR_{i,t}$	= Tingkat Kemiskinan (persen)
$EDU_{i,t}$	= Tingkat Pendidikan (tahun)
i	= Jumlah data <i>cross section</i>
t	= Jumlah data <i>time series</i>
β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	= Koefisien Regresi
$\varepsilon_{i,t}$	= <i>Error Term</i>

3.5 Uji Diagnosa

Uji diagnosa model merupakan serangkaian pengujian statistik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas dan uji validitas instrumen. Meskipun penelitian ini menggunakan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) dalam estimasinya, uji diagnosa tetap perlu dilakukan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi awal data dan model, serta mengidentifikasi adanya indikasi bias dalam data atau parameter estimasi. Jika data sudah mengalami masalah serius dalam uji diagnosa tersebut, maka model OLS tidak lagi menghasilkan estimasi yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sehingga metode GMM menjadi alternatif yang lebih tepat. GMM umumnya digunakan ketika model menghadapi permasalahan endogenitas, autokorelasi, atau heteroskedastisitas berat. Berikut beberapa uji diagnosa yang harus dilakukan:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menganalisis pola distribusi data dalam suatu kelompok variabel. Pengujian ini dilakukan guna mengetahui apakah residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Salah satu metode yang digunakan untuk uji normalitas adalah *skewness-kurtosis*. Pengujian normalitas dilakukan dengan metode *skewness-kurtosis*, di mana kriteria yang digunakan untuk menentukan normalitas data adalah nilai *skewness* yang berada dalam rentang -2 hingga +2 (Ananta et al., 2023). Sedangkan nilai *kurtosis* yang berada dalam rentang -2 hingga +2 (George & Mallery, 2016).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi tinggi atau sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Jika terjadi multikolinearitas sempurna di antara variabel independen, maka koefisien regresi tidak dapat ditentukan, dan standar error menjadi tak terhingga. Namun, jika tingkat multikolinearitas tinggi tetapi tidak sempurna, koefisien regresi masih dapat ditentukan, tetapi nilai standar error yang besar menunjukkan bahwa estimasi koefisien regresi kurang akurat. Model regresi dinyatakan mengalami multikolinearitas jika nilai matriks korelasi (*correlation matrix*) lebih besar dari 0,85 (Widarjono, 2018). Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat multikolinearitas (*correlation matrix* < 0,85)

H_a : Terdapat multikolinearitas (*correlation matrix* > 0,85)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen memiliki varian residual yang seragam. Penentuan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam regresi linier dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F-Statistik (F hitung). Jika nilai probabilitas F hitung lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa regresi linier bebas dari heteroskedastisitas. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas (Probabilitas F-Statistik > 0,05)

H_a : Terdapat heteroskedastisitas (Probabilitas F-Statistik $< 0,05$)

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$) dalam model regresi linier. Jika terdapat korelasi, maka muncul masalah autokorelasi. Autokorelasi biasanya terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu saling terkait, sehingga residual tidak bersifat independen antar pengamatan. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terjadi autokorelasi (Probabilitas F-Statistik $> 0,05$)

H_a : Terjadi autokorelasi (Probabilitas F-Statistik $< 0,05$)

Jika nilai probabilitas F-Statistik lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, yang berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F-Statistik kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak, dan data regresi dianggap mengandung autokorelasi.

3.6 Uji Validitas Instrumen

Untuk menguji validitas instrumen, dilakukan uji Hansen, AR1 dan AR2.

a. Uji Hansen

Pengujian dengan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) akan lebih efisien jika disertai dengan pengujian validitas *instrumental variable* (IV) yang tepat. Uji validitas instrumen dilakukan untuk mengatasi potensi bias dalam parameter estimasi akibat penggunaan instrumen yang tidak sesuai. Penggunaan IV bertujuan untuk mengatasi masalah korelasi antara variabel dependen dengan residual serta korelasi antara lag variabel dependen dengan residual.

Uji validitas instrumen variabel dapat dilakukan menggunakan uji Sargan dan uji Hansen. Dalam penelitian ini, pengujian validitas instrumen variabel (IV) menggunakan uji Hansen, yang merupakan alternatif yang lebih modern dan sering dianggap lebih *robust* dibandingkan dengan uji Sargan. Uji Hansen dirancang untuk menguji validitas instrumen dalam model *Generalized Method of Moments* (GMM)

dan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai keandalan instrumen yang digunakan.

Uji Sargan, meskipun masih banyak digunakan, memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal asumsi yang mendasarinya. Menurut Roodman (2009), uji Sargan dapat memberikan hasil yang kurang akurat jika terdapat instrumen yang tidak valid, dan dalam beberapa kasus, hasilnya dapat dipengaruhi oleh jumlah instrumen yang digunakan. Menurut Xu (2023) uji Sargan tidak *robust* terhadap heteroskedastisitas atau autokorelasi, maka penilaian dilakukan dengan menggunakan uji Hansen dan uji AR. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk mengabaikan uji Sargan dan berfokus pada uji Hansen.

Dengan demikian, fokus pada uji Hansen dalam analisis ini tidak hanya memberikan keandalan yang lebih tinggi dalam pengujian validitas instrumen, tetapi juga menyederhanakan proses analisis dengan mengurangi kebutuhan untuk mempertimbangkan hasil dari uji Sargan yang tidak konsisten. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Arellano & Bond, (1991) serta Roodman (2009) yang menyarankan penggunaan uji Hansen dalam metode GMM.

H_0 : *conditions of moment* valid, artinya instrumen yang digunakan tidak berkorelasi dengan residual

H_a : *conditions of moment* tidak valid, artinya instrumen yang digunakan berkorelasi dengan residual

Pengambilan keputusan dalam uji validitas instrumen didasarkan pada tingkat probabilitas 0,05. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, H_0 diterima yang menunjukkan bahwa instrumen valid karena *conditions of moment* terpenuhi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas $< 0,05$, H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa instrumen tidak valid karena *conditions of moment* tidak terpenuhi.

b. Uji Arellano Bond

Untuk menguji konsistensi instrumen pada model digunakan Uji Arellano Bond. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode tertentu (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya ($t-1$). Jika terjadi korelasi, ini menandakan adanya masalah

autokorelasi, yang dapat menyebabkan hasil estimasi model regresi menjadi tidak efisien karena standar error parameter estimasi tidak akurat, sehingga uji t dan F menjadi tidak valid (Ghozali, 2018). Masalah autokorelasi dapat menghasilkan estimasi koefisien yang konsisten, tetapi dengan varians yang besar, yang pada akhirnya menyebabkan hasil estimasi tidak efisien.

Uji AR memeriksa apakah ada autokorelasi pada *first difference* ordo pertama (AR(1)) dan *first difference* ordo kedua (AR(2)) dari residual. Hasil uji ini dinilai berdasarkan nilai probabilitas. Jika probabilitas $AR(2) > 0,05$, H_0 diterima, menandakan tidak adanya autokorelasi sehingga model valid dan estimasi konsisten. Sebaliknya, jika probabilitas $AR(2) < 0,05$, maka H_a diterima, yang menunjukkan adanya autokorelasi dan model menjadi tidak valid.

3.7 Generalized Method of Moment (GMM)

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel dengan metode *Generalized Method of Moment* (GMM). Salah satu hal yang menentukan penggunaan panel dinamis GMM adalah ada atau tidaknya masalah endogenitas. Penerapan metode GMM memiliki keunggulan dibanding teknik estimasi lainnya dimana metode ini dapat menangani bias endogenitas (Sugiharti et al., 2023). Ullah et al. (2018) menjelaskan bahwa regresi *Ordinary Least Square* (OLS) sering kali menghasilkan estimasi yang bias dan tidak konsisten akibat endogenitas yang tidak terkendali. Selain itu regresi panel statis, misalnya *fixed effect* tidak menggunakan nilai lag dari variabel independen sehingga menyebabkan hilangnya informasi berharga yang dapat menimbulkan masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Metode GMM tepat digunakan pada data panel dengan jumlah unit pengamatan (N) yang besar dan periode waktu (T) yang kecil (Tchamyu, 2020). Dalam kondisi ini, bias dinamis akibat hubungan antara variabel dependen lag dan *error* menjadi penting dan tidak dapat diatasi secara tepat oleh metode OLS atau efek tetap. GMM mampu mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan lag sebagai instrumen yang valid. Namun, jika T terlalu besar, jumlah instrumen dalam GMM, baik pada pendekatan *first-difference* maupun *system*, akan meningkat pesat, yang bisa menyebabkan hasil estimasi menjadi kurang akurat (Roodman, 2009a). Sementara

itu, jika N terlalu kecil, standar error yang disesuaikan terhadap klaster dan uji autokorelasi Arellano–Bond bisa menjadi tidak andal (Roodman, 2009a). Oleh karena itu, struktur data dengan T kecil dan N besar sangat mendukung penggunaan metode GMM secara optimal.

Pendekatan estimator GMM yang diusulkan oleh Arellano dan Bond menghasilkan estimasi yang tidak bias, konsisten, dan efisien (Sugiharti et al., 2023). Namun Blundell dan Bond (2023) merekomendasikan penggunaan Metode *Generalized System of Moments* (SYS- GMM), yang dianggap lebih efisien dibandingkan estimator sebelumnya. Efisiensi ini berasal dari penggabungan informasi level tambahan, yakni momen kondisional dan matriks variabel instrumen level, di samping perbedaan pertama dengan menggabungkan momen kondisional dan matriks variabel instrumen (*first difference* dan level), tersedia dua metode estimasi dalam estimasi GMM untuk mengatasi inkonsistensi dalam estimasi model panel dinamis, yaitu *First Difference* GMM (FD-GMM) dan *System* GMM (SYS-GMM). Sebelum melanjutkan estimasi GMM, model penelitian harus memenuhi persyaratan: valid, konsisten, dan tidak bias.

3.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan langkah penting dalam penelitian kuantitatif untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti.

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji z)

Uji z digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji signifikansi parsial ini dilakukan untuk menguji hipotesis dalam model *Generalized Method of Moments* (GMM). Pengujian signifikansi parsial terhadap hasil regresi dilakukan pada tingkat signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dengan hipotesis berikut:

H_0 : Tidak terdapat hubungan dalam model dengan statistik uji

H_a : Terdapat hubungan dalam model dengan statistik uji

Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya, jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Wald)

Uji signifikansi simultan dilakukan secara bersamaan untuk mengetahui adanya hubungan dalam model. Pada model panel dinamis, digunakan uji Wald untuk melihat apakah terdapat hubungan dalam model (Bond, 1991). Uji Wald adalah uji signifikansi bersama-sama yang digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut Arellano & Bond (1991), hipotesis uji Wald adalah:

H_0 : Tidak terdapat hubungan dalam model dengan statistik uji

H_a : Terdapat hubungan dalam model dengan statistik uji

Pengambilan keputusan uji Wald dilakukan dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel independen memengaruhi variabel dependen atau setidaknya ada satu variabel yang signifikan terhadap model. Sebaliknya, jika nilai probabilitas $> 0,05$, H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan dari analisis dan penjelasan yang disajikan dalam penelitian ini, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa variasi dalam distribusi pendapatan di suatu wilayah tidak serta-merta berdampak langsung pada peningkatan atau penurunan tingkat kriminalitas. Peningkatan ketimpangan pendapatan tidak selalu menyebabkan peningkatan kriminalitas secara langsung dengan adanya pengawasan sosial yang kuat dari keluarga, masyarakat sekitar, lembaga masyarakat dan lembaga keagamaan. Meskipun demikian, ketika sebagian masyarakat merasa tertinggal jauh secara ekonomi dibanding kelompok lain, dapat menyebabkan timbulnya rasa frustrasi, kecemburuan sosial, dan ketidakpuasan yang pada akhirnya dapat memicu tindak kriminal diantaranya pencurian dan penipuan.
2. Peningkatan kemiskinan dapat meningkatkan tingkat kriminalitas di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, terutama ketika peluang kerja terbatas atau pendapatan tidak mencukupi. Selain itu, dilakukan *robustness test* untuk mengevaluasi sejauh mana estimasi utama dalam analisis regresi tetap konsisten ketika spesifikasi model diubah. *Robustness test* ini dilakukan dengan mengganti variabel tingkat kriminalitas menjadi jenis kejahatan tertentu, diantaranya pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, penipuan, penganiayaan dan narkoba. Hasil uji ketahanan (*robustness test*) menunjukkan bahwa kejahatan narkoba cenderung tidak menunjukkan pola yang konsisten sebagaimana yang terlihat pada empat jenis kejahatan

lainnya. Hal ini dikarenakan untuk terlibat dalam kejahatan narkoba, seseorang perlu mengeluarkan biaya, sehingga ketika orang yang hidup dalam kemiskinan tidak mampu melakukan kejahatan ini. Namun, bukan berarti orang tersebut sama sekali tidak bisa, karena dalam beberapa kasus, orang miskin bisa saja mencuri, menipu, atau bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan uang untuk terlibat dalam kejahatan narkoba.

3. Peningkatan pendidikan dapat meningkatkan tingkat kriminalitas di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan di suatu wilayah, justru diikuti dengan peningkatan tingkat kriminalitas. Seseorang berpendidikan dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap teknologi, jaringan, dan informasi, yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan intelektual dengan modus yang lebih kompleks dan sulit terdeteksi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pendidikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terbuktinya kemiskinan dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, maka pemerintah pusat dan daerah perlu memperluas program padat karya di wilayah dengan angka kemiskinan tinggi, khususnya di sektor informal dan pertanian. Selain itu, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan. Program bantuan sosial, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga perlu dioptimalkan agar tepat sasaran dan mencakup kebutuhan dasar masyarakat miskin.
2. Lembaga penyelenggara pendidikan (sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi) berkoordinasi dengan *stakeholder* dapat mengembangkan kurikulum pendidikan karakter yang mengintegrasikan materi antikorupsi, anti-narkoba, dan kesadaran hukum. Selain itu, pelatihan kewirausahaan di sekolah dan kampus juga penting untuk menciptakan lulusan yang mandiri dan siap kerja.

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pendidikan dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar mempertimbangkan penambahan variabel lain yang juga berpotensi berkontribusi terhadap kriminalitas, diantaranya pengangguran, kepadatan penduduk, dan urbanisasi. Variabel-variabel tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, P., Kamal, M. E. bin M., & Mohamed, N. (2023). Public Spending, Corruption, and Human Development: Empirical Evidence in Middle-Income Countries. *Proceedings of the International Conference in Technology, Humanities and Management (ICTHM 2023), 12-13 June, 2023, Istanbul, Turkey, 131*, 561–579. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.48>
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Test of Spesification for Data Panel: Monte Carlo Evidence and an Aplication of Employment Equations. *Source: The Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297. doi:10.2307/2297968
- Aziz, L., & Ridwan. (2025). Dinamika Kriminalitas Dalam Masyarakat (Faktor Sosial dan Solusinya). *Jurnal PKM Merah Putih*, 1(1), 33–43.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Kriminal. *Badan Pusat Statistik*, 021, 10. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>
- Banik, B., Roy, C. K., & Hossain, R. (2023). Healthcare expenditure, good governance and human development. *EconomiA*, 24(1), 1–23. <https://doi.org/10.1108/ECON-06-2022-0072>
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. In *The American Journal of Surgery* (Vol. 92, Issue 3). [https://doi.org/10.1016/S0002-9610\(56\)80126-8](https://doi.org/10.1016/S0002-9610(56)80126-8)
- Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education (3rd ed.). In *IEEE Software* (Vol. 15, Issue 6). <https://doi.org/10.1109/52.730859>
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87, 115–143. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2023.03.001>
- BNN, H. (2024). *Deklarasi Pelajar AntiNarkoba Dan Tawuran: Bangkitkan kesadaran Remaja , Mawas Diri Dari Ancaman Narkoba*. BNN. <https://bnn.go.id/deklarasi-pelajar-antinarkoba-dan-tawuran-bangkitkan-kesadaran-remaja-mawas-diri-dari-ancaman-narkoba/>
- Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data:monte carlo evidence and an application to employment equations. *Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297. <https://doi.org/10.2307/2297968>
- Bonger, W. A. (1916). *Crime and Economic Conditions*.
- BPS. (2009). *Gini Ratio Kabupaten Rembang 2009*.

- BPS. (2013). *Data Dan Informasi Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013*.
- BPS. (2024a). Statistik Indonesia 2024. In *Statistik Indonesia 2024* (Vol. 52). <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- BPS. (2024b). Statistik Kriminal 2024. In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 15, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu_rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Burt, H. E. (2005). Education and crime prevention. *Legal Psychology*, 2004, 415–423. <https://doi.org/10.1037/10730-019>
- Cho, S.-Y. (2016). *A crime 2.0: Cybercrime, e-talent, and institutions* MAGKS. 08. <http://hdl.handle.net/10419/129284www.econstor.eu>
- Edward, A. O., & Azhar, Z. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 759. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7703>
- Effendi, T. (2017). Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan. *Malang: Setara Press*.
- Elliott, M. A. (1952). *Crime in modern society*.
- Fauziah, R. (2019). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Disparitas Pendapatan, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Kriminalitas Properti Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Aset*, 1, 3–11.
- Felson, R. B., & Staff, J. (2017). Committing economic crime for drug money. *Crime and Delinquency*, 63(4), 375–390. <https://doi.org/10.1177/0011128715591696>
- Frieze, I. H., Greenberg, M. S., & Hymer, S. (1987). *Describing the Crime Victim : Psychological Reactions to Victimization*. 18(4), 299–315.
- George, D., & Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step. In *IBM SPSS Statistics 23 Step by Step*. <https://doi.org/10.4324/9781315545899>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). *Universitas Diponegoro*.
- GOCI. (2023). *Global Organized Crime Index*.
- Gök, A. (2021). The role of higher education on corruption: comparison of European Union and African Union. In *Handbook of Research on Institution Development for Sustainable and Inclusive Economic Growth in Africa* (pp. 28–38). IGI Global Scientific Publishing.

- Hardianto, F. N. (2009a). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia dari Pendekatan Ekonomi. In *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar* (Vol. 13, Issue 2, pp. 28–41).
- Hardianto, F. N. (2009b). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 13(2), 28–41.
- Hayashi, F. (2000). *Econometrics*.
- He, L., Páez, A., & Liu, D. (2016). Persistence of Crime Hot Spots: An Ordered Probit Analysis. *Geographical Analysis*, 49(1), 3–22. <https://doi.org/10.1111/gean.12107>
- Ikhsan, & Amri. (2023). Exploration of macroeconomic effects on criminality in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206678>
- Ipiyanto, M., & Fujiansyah, D. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2022. 03(02), 62–72.
- Jonathan, N., Bolanle, A., & Ayeni, I. H. (2017). Cybercrime and Computer Science Undergraduate Students in Private Universities in Nigeria: An Empirical Investigation. *International Journal of Computer Trends and Technology*, 51(1), 34–37. <https://doi.org/10.14445/22312803/ijctt-v51p105>
- Kasim, F. S., & Hendra, H. (2023). Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Tindakan Kriminal Di Kabupaten Tolitoli Periode 2012-2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 11–20. <https://doi.org/10.59827/jie.v2i2.81>
- Kelly, M. (2000). Inequality and crime. *Review of Economics and Statistics*, 82(4), 530–539. <https://doi.org/10.1162/003465300559028>
- Komdigi. (2020). *Indonesia Peringkat ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber*. Komdigi. <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/indonesia-peringkat-ke-2-dunia-kasus-kejahatan-siber>
- Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F., & Santoso, E. (2021). Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), 1–9. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16307>
- Mardinsyah, A. A., & Sukartini, N. M. (2020). Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan dan Akses Informasi : Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas ? *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v5i1.554>
- Merton, R. K. (1938). *Social structure and anomie*. 3(5), 672–682. <https://doi.org/10.4324/9781351157803-1>
- Muhdar. (2015). Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi. *Jurnal Al-Buhuts*, 11(1), 42–66.

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab%0APOTRET>

- Murialti, N., & Hadi, M. F. (2023). Analisis Tingkat Kriminalitas Di Propinsi Dengan Pendekatan Data Panel. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(1), 56–64. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4874>
- Nahe, S. S., Rahman, F., Taqwa, E., Lutfi, M., & Yunus, S. (2024). Aalisis Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kriminalitas di Sulawesi Tengah Periode 2018-2022. *Jurnal Politik Dan Pemerintah Daerah*, 6(2), 203–213.
- Neumayer, E. (2005). Is Inequality Really a Major Cause of Violent Crime? Evidence from a Cross-National Panel of Robbery and Violent Theft Rates. *SSRN Electronic Journal*, 42(1), 101–112. <https://doi.org/10.2139/ssrn.482653>
- Neumayer, E., & Plümper, T. (2017). *Robustness Tests for Quantitative Research*. <https://doi.org/10.1017/9781108233590>
- Nisa, W. K., Simanjuntak, V. I., Kartika, S., & Fadila, A. (2024). Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 1(3), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jampk.v1i3.220>
- Permana, S., & Setiawan, M. (2024). *Integritas : Jurnal Antikorupsi Corruption in the education sector in Indonesia : Reality , causes , and solutions*. 10(2), 249–268.
- Prasastisiwi, A. H. (2024). *Indonesia Masuk 20 Besar Negara dengan Indeks Kriminalitas Tertinggi di Dunia*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/indonesia-masuk-20-besar-negara-dengan-indeks-kriminalitas-tertinggi-di-dunia-3ktwI>
- Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(2). <https://doi.org/10.35448/jequ.v2i2.7165>
- Pusiknas. (2023). *Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat*. Pusiknas Bareskim Polri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat
- Reuter, P. (2014). *Oxford Handbooks Online Drug Markets and Organized Crime*. March 2017, 1–30. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199730445.013.004>
- Ribotta, S. (2023). Poverty As a Matter of Justice. *Age of Human Rights Journal*, 20(20), 1–24. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v20.7327>
- Roodman, D. (2009a). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. *Stata Journal*, 9(1), 86–136. <https://doi.org/10.1177/1536867x0900900106>
- Roodman, D. (2009b). Practitioners' corner: A note on the theme of too many

- instruments. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 71(1), 135–158.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2008.00542.x>
- Saleemi, Waqar, M., Amir-ud-Din, & Rafi. (2019). *How does quality of governance influence occurrence of crime? A longitudinal analysis of Asian countries*. 94142. https://mpa.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/94142%0Ahttps://mpa.ub.uni-muenchen.de/94142/1/MPRA_paper_94142.pdf
- Silvia, & Ikhsan. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Kepadatan Penduduk terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 23–30.
- Simanungsong, N. A. (2013). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Journal of Economic and Strategic Management*, 2(2).
- Situmeang, S. M. T. (2021). Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 19(1), 35–44.
- Situmorang, S. E. (2024). *Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Indonesia pada Tahun 2022*. 2(2), 1621–1628.
- Socha, R. (2021). Sense of Security and Crime: The Residents' Perspective. *European Research Studies Journal*, XXIV(Special Issue 4), 501–511.
<https://doi.org/10.35808/ersj/2784>
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Soraya, N., Nurfikri, M. A., Rafi, A., & Kurniawan, M. (2024). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2013-2023 Data Registrasi Polri Kejadian Kejahatan Di Indonesia Periode 2012-2023 Menurut Statistik Kriminalit. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 270–284.
- Stiawan, B., & Yusuf, H. (2025). Dampak Kriminalitas Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Urban. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 308–312.
- Sugiarti, U. (2024). *10 Kasus Hacking Paling Menggemparkan di Indonesia*. Lawencon. <https://www.lawencon.com/daftar-kasus-hacking-di-indonesia/>
- Sugiharti, L., Esquivias, M. A., Shaari, M. S., Agustin, L., & Rohmawati, H. (2022). Criminality and Income Inequality in Indonesia. *Social Sciences*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/socsci11030142>
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Rohmawati, H. (2023). The Nexus between Crime Rates, Poverty, and Income Inequality: A Case Study of Indonesia. *Economies*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/economies11020062>
- Supranto, J. (2016). *Statistik: Teori dan Aplikasi*.
- Supriadi, B., & Kurniati, P. (2021). *Wakil Ketua KPK Sebut 86 Persen Koruptor Lulusan Perguruan Tinggi*. Kompas.

- <https://regional.kompas.com/read/2021/10/22/163105878/wakil-ketua-kpk-sebut-86-persen-koruptor-lulusan-perguruan-tinggi?page=all>
- Syahputra, A., Harahap, I., M. Nawawi, Z., & Kaswinata, K. (2023). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tantangan dan Prospek Masa Depan. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 144–161. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41929>
- Tchamy, V. S. (2020). Education, lifelong learning, inequality and financial access: evidence from African countries. *Contemporary Social Science*, 15(1), 7–25. <https://doi.org/10.1080/21582041.2018.1433314>
- Todaro. (2015). Economic Development. In *Pearson*. <http://eco.eco.basu.ac.ir/BasuContentFiles/57/57304a77-1269-4081-bd5b-4c66b84b06a4.pdf>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Ullah, S., Akhtar, P., & Zaefarian, G. (2018). Dealing with endogeneity bias: The generalized method of moments (GMM) for panel data. *Industrial Marketing Management*, 71(November), 69–78. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.11.010>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (pp. 1–7). (2003).
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Washton, A. M. P., Gold, M. S. M., & Pottash, A. C. M. (1984). *Advances in Alcohol & Substance Abuse Alcohol* : 4(2), 51–57. <https://doi.org/10.1300/J251v04n02>
- Wicaksono, A. S., & Suharto. (2023). Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 50–57. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss1.art6>
- Wicaksono, H., Budiyono, & Dwiatmodjo, H. (2015). *Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp) APPLICATION*. 151(1), 151–160.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan aplikasi Disertai Panduan Eviews (kelima)*. UPP STIM YKPN.
- Winda, N., & Sentosa, S. U. (2021). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tindakan Kriminalitas Di Provinsi-Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(4), 65. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i4.12376>
- Wojowasito, S., Wojowasito, S., Poerwadarminta, W. J. S., & Woyowasito, T. W. (1982). *Kamus Lengkap, Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris: Dengan*

Ejaan Yang Disempurnakan. Hasta.
<https://books.google.co.id/books?id=UStzwgEACAAJ>

Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (5th ed.). South-Western, Cengage Learning.
<https://doi.org/10.1201/9781315215402-43>

Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics 7th ed.* Cengage Learning.

Xu, Z. (2023). CEO-TMT overseas experience differences and firm performance: A self-categorization theory perspective. *Heliyon*, 9(7), 1–12.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17845>